

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Anthony Giddens, masyarakat modern merupakan produk dari tiga perkembangan yang berbeda tetapi saling berkait, yaitu *negara-bangsa*, *kapitalisme*, dan *industrialisme*. Negara bangsa sendiri merupakan suatu fenomena histories yang baru muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan karakter sebagai suatu "*penyatuan suatu parangkat administrative atas daerah tertentu*". Munculnya negara-bangsa itu diawali dengan berbagai model system negara. Pada awal abad ke-1 sampai ke-5 dikenal *imperium*, misalnya Romawi; lalu muncul negara *feodal*, kemudian terjadi pada abad ke-15 sampai abad ke-18 bentuk negara *monarki absolute* (Perancis, Prussia, Austria, Spanyol, Swedia, dan Rusia) dan *monarkhi konstitusional* (Inggris dan Belanda). Di akhir abad ke-20, sebuah era yang ditandai dengan munculnya globalisme atau sering juga disebut sebagai "*globalisasi*" hadir dengan mengusung ideologi neo-liberalisme. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah benar peranan negara-bangsa telah hancur karena disebabkan lahirnya globalisasi dengan ideology neo-liberalismenya?

Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang murah merupakan salah satu faktor pendorong (*katalis*) bagi globalisasi. Perkembangan system ekonomi di era informasional dan global sekarang ini secara nyata bergerak ke

Institusi ekonomi seperti *Wall Street* (bursa saham di Amerika) dan berbagai macam bentuk lainnya diseluruh dunia merupakan institusi yang mengendalikan manajemen aliran virtual sifatnya. Computer dan Handphone merupakan alat-alat yang vital yang sangat menunjang efektifitas dan efisiensi kerja dalam tatanan global saat ini. Era teknologi informasi, itulah katanya.

Tekhnologi komunikasi dan informasi, tentu saja sangat berjasa dalam mendukung proses ini. Dunia sedang dibentuk untuk menuju satu tatanan global, dalam kerangka inilah kemudian globalisasi diartikan. Yaitu, sebuah tatanan dunia yang tunggal dan seragam dari segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>1</sup>. Secara umum dapat dikatakan bahwa globalisasi mempengaruhi tiga hal. *Pertama*, bidang ekonomi politik. *Kedua*, teknologi komunikasi dan informasi dan *ketiga*, adalah pada gaya hidup atau *life style*.

Bagi kalangan yang sangat optimis terhadap globalisasi, seperti Thomas L. Friedman dan beberapa penulis lain, globalisasi adalah satu-satunya jalan yang dapat digunakan umat manusia untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Runtuhnya berbagai system ekonomi yang menjadi "*rival*" kapitalisme, telah menyakini sebagian kelompok ini bahwa globalisasi dan liberalisasi pasar telah menawarkan alternative bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih baik, dan efisiensi ekonomi, sesuatu yang tak dapat diberikan oleh sosialisme maupun komunisme.

Berangkat dari asumsi yang diangkat dari kaum globalis, konsep globalisasi merujuk pada fenomena di mana batas-batas negara bangsa tidaklah lagi relevan

untuk didiskusikan. Bagi kelompok ini, ini adalah sejarah baru bagi kehidupan manusia di mana “negara tradisional tidaklah relevan lagi, lebih-lebih menjadi tidak mungkin dalam unit-unit bisnis dalam sebuah ekonomi global. Dalam hal ini globalisasi membawa serta gejala “*denasionalisasi*” ekonomi melalui pendirian jaringan-jaringan produksi transnasional (*transnational network of productions*), perdagangan, keuangan. Dalam lingkungan yang tanpa batas ini (*economic borderless*), pemerintah nasional tidak lebih dari sekadar *transmission belt* bagi kapital global, atau sebagai institusi perantara yang menyisip di antara kekuatan lokal dan regional yang sedang tumbuh, serta mekanisme pengaturan global.

Lebih lanjut kelompok ini mempunyai keyakinan bahwa globalisasi ekonomi tengah membangun bentuk-bentuk baru organisasi social yang tengah menggantikan atau yang akhirnya akan menggantikan negara bangsa sebagai lembaga ekonomi utama dan unit politik dari masyarakat dunia. Globalisasi tidak berkembang begitu saja. Karena sebelum lahirnya teknologi informasi yang amat menunjang lancarnya ekonomi global saat ini, globalisasi telah ada dari dulu yang telah menghubungkan interaksi antar negara di dunia. Penulis seperti Hirst dan Thompson sampai pada kesimpulan bahwa situasi perdagangan masa kini tidak lebih bebas dibandingkan dengan situasi perdagangan beberapa decade yang lalu<sup>2</sup>. Ada beberapa alasan yang dikemukakannya untuk memperkuat preposisi ini. *Pertama*, tatanan ekonomi saat ini bukannya tanpa preseden: dengan maksud ekonomi internasional saat ini tidak lebih terbuka dibandingkan dengan ekonomi dunia tahun 1870 hingga tahun 1914. *Kedua*, perusahaan transnasional murni

---

<sup>2</sup> Lih. Paul Hirst dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah mitos* (Yayasan Obor

jarang ditemukan. *Ketiga*, lalu lintas modal tidak mengakibatkan berpindahnya penanaman modal dan kesempatan kerja dari negara maju ke negara berkembang. Aliran modal tersebut lebih banyak berputar di negara maju. *Keempat*, ekonomi dunia jauh dari murni. *Kelima*, kekuatan ekonomi tritunggal (Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat) mempunyai kemampuan untuk mengatur pasar modal dan aspek-aspek ekonomi lainnya.

Jika di teliti lebih jauh, perkembangan globalisasi pada hakekatnya dijiwai oleh semangat ekspansi yang merupakan corak dasar dari kapitalisme dengan faham liberal nya. Puluhan tahun yang lalu, Vladimir Ulianov atau yang lebih kita kenal dengan nama Lenin di dalam bukunya *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism* yang ditulisnya di negeri Swiss pada tahun 1916, menuliskan “*bahwa imperialisme merupakan puncak tertinggi dari kapitalisme*”, ketika pasar dalam negeri sudah tidak mencukupi lagi maka diambillah jalan ekspansi<sup>3</sup>. Jelaslah bahwa globalisasi telah ada dari dulu dan terus mengalami evolusi hingga saat ini. Ini semua terjadi ketika kapitalisme eropa masih sangat muda yang masih menggunakan cara-cara lama dalam menancapkan kuku-kukunya di dunia saat itu.

Pada awal mulanya, ekspansi yang dilakukan oleh negara-negara eropa dalam mengkoloni negara-negara lainnya melalui kekuatan fisik. Ekspansi yang menekan pada keserakahan manusia, yang selalu berusaha mencari tambahan kekayaan, yang dikuasai oleh kepentingan ekonomi. Ekspansi ini dilengkapi dengan fasilitas penuh, yaitu dengan kekuatan militer yang amat banyak memakan biaya. Banyak orang mengatakan bahwa fase ini adalah fase kapitalisme rampok,

---

yang tidak lagi mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Cara ini lambat laun ditinggalkan akibat berbagai kritik untuk menghentikan penjajahan mulai bermunculan. Atas nama hak asasi manusia penjajahan harus dihapuskan, sehingga pada tahun 1950-an penjajahan nyaris tidak berlangsung lagi. Kecuali di beberapa negara tertentu. Berakhirnya kolonialisme telah memasukkan dunia pada era *neo kolonialisme*, ketika modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung, melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi.

Memasuki awal 50-an, dunia mulai terbagi menjadi dua blok, yaitu komunisme dan kapitalisme-liberalisme yang mengakibatkan dunia mengalami perang dingin yang berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya. Komunisme yang berada pada blok timur yang dimotori oleh Uni Soviet sedangkan kapitalisme-liberalisme dimotori Amerika Serikat berada pada blok barat. Perseteruan ini akhirnya dimenangkan oleh Blok Barat, jauh hari sebelum runtuhnya tembok berlin, dan kehancuran Uni Soviet pada tahun 1991. fakta ini semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa negara-negara yang berada pada blok barat mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat pasca PD II. Padahal keadaan ekonomi dunia pada waktu itu cukup parah setelah berlangsungnya perang yang amat hebat. Contohnya seperti Jerman yang mempunyai banyak hutang akibat perang dan dengan kondisi negara yang berada diambang kehancuran. Pasca kekalahan dalam Perang Dunia II, ekonomi Jerman mengalami krisis sangat parah, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan adalah keadaan yang serba biasa. Akan tetapi, itu semua sekita berubah setelah Jerman menerima paket

seperti sediakala bahkan lebih baik lagi<sup>4</sup>. Hal ini merupakan sesuatu hal yang amat luar biasa ketika terjadi suatu krisis ekonomi maha dahsyat negara itu mampu bangkit dengan cepat dan meninggalkan keadaan ekonomi yang telah menyengsarakan bangsanya.

Sebaliknya, kegagalan yang dialami oleh komunisme tidak lain dikarenakan oleh ia sendiri. Komunisme hanya mampu memberikan utopia belaka, sedangkan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu adalah realita. Apalagi dengan kondisi negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan negaranya dari tangan penjajah. Tentunya dibutuhkan gerak cepat dalam membenahi keadaan ekonomi pada saat itu. Dan ternyata kapitalisme lah yang mampu memberikannya. Walaupun kita tidak dapat memungkiri bahwa kapitalisme juga beberapa kali mengalami krisis, akan tetapi itu semua dengan mudah dapat ditanggulangi sehingga proses ekonomi dapat terus berlangsung dengan lancar. Kalau Arif Budiman mengatakan bahwa kapitalisme itu selalu dapat beradaptasi kapan saja dan dimana saja. Apalagi produk-produk yang disajikan ibarat wanita-wanita cantik yang selalu dapat menarik perhatian para konsumennya.

Sebagaimana kita ketahui, pendirian neo-liberal pada prinsipnya tidak bergeser dari paham liberalisme yang dipikirkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nation* (1776). Akan tetapi krisis berkepanjangan yang menimpa kapitalisme awal abad XIX, yang berdampak pada depresi ekonomi tahun 30-an

---

<sup>4</sup> *Marshall plan* atau *rencana Marshall* adalah sejenis program bantuan yang di tawarkan Amerika pasca perang dunia II kepada Negara-negara yang hancur ekonominya akibat perang dunia II dan sebagai strategi untuk membendung laju perkembangan komunisme di setiap negara, lihat Jurnal wacana *Hutang itu Hutang*, editor Roem  
Tanjungpura, Jember, Desember 2000

yang kita kenal dengan *krisis malaise*<sup>5</sup> yang telah mengakibatkan tenggelamnya paham liberalisme, dan akibatnya pendulum beralih dengan memperbesar peran pemerintah terutama sejak presiden Franklin Rosevelt dengan gagasan *New Dealnya* pada tahun 1935. Sehingga pada tahun 1950-an mekanisme pasar murni tidak sepenuhnya berlaku dalam rangka membangun ekonomi sebuah negara, sehingga diasumsikan perlunya intervensi negara dalam menjalankannya. Gagasan liberal murni yang menjadi ruh sistem ini sedikit dirubah, mekanisme pasar tetap, tetapi di ikuti dengan campur tangan negara agar pengalaman *malaise* tahun 1929 tidak terulang kembali. Sistem ekonomi ini di kemudian hari disebut sebagai gagasan *keynesian* atau negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Aliran ini diilhami oleh seorang ekonom Inggris Jhon Maynard Keynes, dimana ini dapat dibagi menjadi tiga pokok pikiran: *pertama*, adanya intervensi negara. Hal ini diasumsikan bahwa kapitalisme mempunyai cacat bawaan, yakni kurangnya permintaan (*demand*). Oleh karena itu, agar kapitalisme dapat berkembang maka pemerintah harus terlibat aktif dalam meningkatkan permintaan (*demand*) melalui belanja publik. Contohnya seperti, penigkatan upah pekerja. *Kedua*, program-program kesejahteraan (*welfare state*). Adanya redistribusi pendapatan yang diasumsikan sebagai tindak keadilan di dalam masyarakat<sup>6</sup>.

Akan tetapi, pada tahun 1970-an negara-negara kapitalisme kembali mengalami krisis. Pada era ini terjadi perubahan pada konstelasi ekonomi politik dunia yaitu terjadinya *stagflasi* (stagnasi ekonomi yang dibarengi inflasi) yang

---

<sup>5</sup> Adalah Krisis pertama yang menimpa system kapitalisme akibat semua kegiatan ekonomi diserahkan lewat mekanisme pasar, walhasil pasar tidak mampu menyerapnya sehingga terjadi over produksi

<sup>6</sup> Lihat Budi Winarno, *Globalisasi, Wujud Imperialisme Baru, Peran Negara dalam*

setidaknya banyak mempengaruhi pola pemikiran ilmuwan yang tergabung dalam *Epistemic Community* dalam mengatasi masalah pembangunan yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang. Pada masa ini, negara-negara Arab, produsen minyak utama dunia, membentuk sebuah kartel, OPEC, yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Pada saat ini pun sedang berlangsung perang antar Arab dan Israel. Karenanya, hal ini mendorong kenaikan harga-harga dan upah-upah. Akibat lebih jauh adalah mendorong terjadinya resesi ekonomi, pengangguran, dan inflasi yang melambung tinggi mencapai angka 20% di seluruh negara, serta ketidakmampuan negara-negara dunia ketiga membayar hutang-hutangnya.

Akan tetapi itu dengan mudah kembali dapat di atasi. Sistem ekonomi keynesian dirobak karena dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis. Sistem ekonomi ini dinilai sangat boros dan tidak efektif. Dikarenakan sistem ini diasumsikan tidaklah lagi relevan dalam menjalankan kebijakkannya, maka dalam konteks ini lah kita mengenal leberalisme baru, atau lebih dikenal dengan nama neo-leberalisme. Puncaknya adalah ketika naiknya Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika. Kedua pemimpin ini membongkar habis tatanan nilai *Welfare State* yang berkembang mulai dari tahun 40-an karena dianggap sebagai biang penyebab krisis. Dengan naiknya kedua pemimpin ini berarti naiknya bendera neo liberalisme sehingga melahirkan apa yang kita kenal sebagai *Washington Consensus*.

Di samping itu, globalisasi atau neo-liberalisme sebagai proses

diperankan juga oleh beberapa aktor utama. Tiga aktor utama tersebut pertama, Perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs), yaitu perusahaan multinasional yang besar . kedua, *World Trade Organization* (WTO) yang mana dia adalah suatu dewan perserikatan perdagangan global atau yang lebih dikenal dengan polisi perdagangan. Ketiga, lembaga keuangan multilateral seperti *World Bank* (WB) dan *International Monetary Fund* (IMF)<sup>7</sup>. Ketiga aktor tersebut menetapkan aturan-aturan seputar investasi, *Intellectual Property Rights* (IPRs), dan kebijakan internasional.

Secara lebih spesifik, neo-liberalisme didirikan atas beberapa pokok: *pertama*, pembebasan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang-bidang perburuhan, investasi, harga, serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri, untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan, seperti Otorita Batam, NAFTA, SIJORI, dan lain sebagainya. *Kedua*, pencabutan subsidi rakyat karena dinilai bertentangan dengan prinsip pasar bebas serta persaingan bebas. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan privatisasi terhadap semua perusahaan milik negara. *Ketiga*, penghapusan ideologi “kesejahteraan bersama” dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat “tradisional”. Karena itu dinilai akan menghalangi pertumbuhan ekonomi.

Dalam wacana globalisasi dengan ideologinya neo-liberalisme, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menyertakan perusahaan multinasional (MNCs), dan investasi langsung asing (FDI). Hal ini dikarenakan oleh kesalinghubungan

---

<sup>7</sup> Lihat DR. Mansour Faqih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*,

(*interlink*), integrasi, dan interdependensi mengemuka karena aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, baik melalui perdagangan maupun investasi. Sejak tahun 1980-an, perusahaan-perusahaan multinasional telah menjadi aktor-aktor utama disamping negara bangsa dalam percaturan ekonomi politik internasional. Diperkirakan pada awal tahun 1990-an, terdapat kurang lebih 37 ribu perusahaan multinasional (MNC) yang mengendalikan kira-kira 170 ribu organisasi yang terafiliasi. Dari semua perusahaan tersebut, 24 ribu (kira-kira 70%) bermarkas di dalam negeri di empat belas negara maju OECD dan sekitar 90% bermarkas besar di negara maju. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Hirst dan Thompson.<sup>8</sup>

Selain itu kita pun mengenal IMF, WTO, WB yang mana ketiga lembaga ini adalah agen penting dalam sistem ekonomi yang dibangun oleh neo-liberalisme. Secara umum dapat dikatakan bahwa IMF yang didirikan pada tahun 1945 dengan kantor pusat Washington DC bertugas menstabilkan neraca pembayaran sebuah negara yang sedang terkena dengan masalah keuangan, tentunya dengan sekian jumlah kesepakatan yang disebut sebagai *Structural Adjustment Programm (SAP)* yang dituangkan secara rigid dalam bentuk *Letter of Intens (LoI)*. Sejak 1979, lembaga ini juga mempromulasikan stabilisasi dan transformasi kebijakan negara secara sistemik untuk negara-negara yang menderita kesulitan keuangan yang kronis akibat pembiayaan utang luar negeri atau karena transisi dari perencanaan sentral komunisme. Bank Dunia (WB), yang dahulunya berdiri dengan nama IBRD lewat perjanjian yang sama dengan IMF yaitu perjanjian *Bretton Woods*

---

paska perang Dunia II, berfungsi sebagai pemberi pinjaman pembangunan pada negara yang kesusahan dana segar untuk program pembangunan. Lembaga ini amat berperan penting dalam memberikan bantuan dana bagi negara yang terkena permasalahan ekonomi ataupun sebagai upaya pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada era Soeharto.

Sedangkan WTO lebih dikenal sebagai polisi perdagangan dunia. Pada awalnya lembaga ini didirikan dengan asumsi mampu memecahkan masalah-masalah perdagangan internasional. Dan sebelumnya, lembaga ini bernama *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. Dan sebagai langkah penting untuk menuju kelengkapan kerja institusi-institusi internasional yang diusulkan di Brettons Woods lima puluh tahun sebelumnya, melalui putaran Uruguay (*Uruguay Around*) didirikanlah WTO pada tanggal 1 januari 1992 guna memecahkan permasalahan perdagangan internasional. Putaran ini beberapa hal penting, yaitu: *pertama*, hak milik intelektual yang berhubungan dengan perdagangan (*Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights –TRIPs*). *sKedua*, kesepakatan umum dalam dalam perdagangan dan jasa (*General Agreement on Tarrif and Sevice – GATs*). *Ketiga*, pertanian. *Keempat*, investasi langsung asing (*Foreign Direct Invesment - FDI*)<sup>9</sup>. Ketiga lembaga ini acapkali dikritik karena dianggap sebagai agen dari neo liberalisme dimana sering kali menyengsarakan pembangunan ekonomi dan politik di negara berkembang. Kritik yang di lakukan beberapa pakar, seperti: James Petras dan Henry Veltmeyer, Graham Thompsom dan lainnya bukan tidak berlandaskan fakta di

---

lapangan. Negara-negara di Amerika Latin, Asia, Afrika adalah merupakan bukti nyata dari penghisapan, penyengsaraan yang dilakukan tiga lembaga ini.

Hasil-hasil perundingan melalui berbagai putaran dalam kerangka GATT dan WTO ditenggarai semakin menyulitkan posisi negara-negara miskin. Mereka dipaksa untuk membuka seluas-luasnya wilayah mereka untuk investasi, sementara pada saat bersamaan perusahaan-perusahaan nasional mereka tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang mempunyai banyak keunggulan, baik dalam bidang teknologi, manajemen maupun informasi. Akibatnya, banyak perusahaan-perusahaan nasional di negara-negara berkembang gulung tikar. Kemudian IMF sebagai lembaga keuangan internasional cenderung memaksakan segala bentuk kebijakkannya. Contoh ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997. dalam kasus ini, pinjaman IMF hanya akan diberikan jika pemerintah Indonesia mau mengadopsi syarat-syarat yang diajukan oleh IMF melalui LoI (*Letter of Intent*). Yang mana isinya antara lain, privatisasi BUMN dan pemotongan subsidi publik. Dan nyatanya krisis ekonomi Indonesia tak kunjung reda sampai saat ini.

Dengan melihat fakta realitas tatanan global saat ini, globalisasi malah menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran di setiap negara. Masyarakat di negara maju dikhawatirkan oleh adanya invasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari negara maju lainnya. Misalnya, banyak publik Amerika merasa khawatir atas serbuan perusahaan-perusahaan dan produk-produk Jepang, Cina, Korea. Kekhawatiran ini lantas menjadi salah satu penyebab munculnya

perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah mendorong terjadinya regionalisme melalui pasar tunggal Eropa. Sementara AS membentuk NAFTA yang beranggotakan Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko. Sementara Jepang sedang berorientasi ke wilayah Asia Timur. Inilah yang menjadi paradoks dalam globalisasi. Bahwa seharusnya akses pasar harus semakin terbuka, tetapi yang terjadi malah bentuk-bentuk perlawanan terhadap globalisasi ekonomi itu sendiri dalam bentuk regionalisme ekonomi. Oleh karena itu, Dani Rodrik<sup>10</sup> mengatakan:

Dengan menggunakan banyak ukuran, ekonomi dunia lebih terintegrasi tinggi pada saat standar emas diberlakukan di akhir abad 19 daripada yang berlaku sekarang ini. Sementara di Amerika Serikat dan Eropa, volume perdagangan mencapai puncak sebelum perang dunia pertama. Perdagangan bergairah kembali setelah tahun 1950, tetapi baik Amerika Serikat maupun Eropa tidak lebih terbuka saat ini dibandingkan dengan periode di bawah standar emas. Sementara ekspor Jepang secara aktual berkurang dari total produksinya saat ini dibandingkan selama periode antar perang.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa globalisasi yang katanya meleburkan negara bangsa ke dalam entitas global, dimana pembahasan menyangkut batas-batas negara bangsa tidak lagi relevan karena sudah terintegrasi ke dalam pasar global, pada kenyataannya masing-masing negara masih terisolasi satu dengan yang lain. Menurut Rodrik, meskipun revolusi dalam bidang transportasi dan komunikasi dan kemajuan substansial yang dibuat dalam liberalisasi perdagangan selama lebih kurang tiga dekade, ekonomi nasional tetap terisolasi satu dengan yang lain. Isolasi ini mempunyai implikasi yang krusial, sebagaimana

---

<sup>10</sup> Dani Rodrik (2000), "Sense and Nonsense in the Globalization Debate", dalam Jeffrey A. Freiden and David A. Lake (eds.), *International Political Economy: Perspective on Global Power and Wealth*, (Fourth Edition, Boston: Bedford/St.

diungkapkan Paul Krugman bahwa hampir semua pemerintahan di negara-negara industri maju tidak terbelenggu oleh globalisasi ekonomi sebagaimana yang diyakini selama ini. Mereka masih tetap mempunyai otonomi yang substansial dalam mengatur ekonomi mereka, dalam menyusun kebijakan sosial, dan kebijakan-kebijakan pengelolaan dana dan dalam memelihara lembaga yang berbeda dengan mitra dagang mereka.

Dengan ini dapat dilihat bahwa usaha-usaha mengintegrasikan pasar nasional dalam pasar global tidak mempunyai pengaruh yang signifikan bagi otonomi negara bangsa tersebut. Pandangan di atas amatlah berbeda dengan pandangan pendukung ekstrim globalisasi yang mengatakan bahwa, globalisasi telah memarjinalkan peran negara bangsa dan mendiskusikannya tidak lagi relevan karena perannya telah digantikan oleh aktor-aktor non-teritorial.

Dalam perspektif realis, ini sangatlah berbeda. Bagi mereka setiap negara selalu ada upaya untuk meningkatkan kekuatan, baik itu politik maupun ekonomi serta memberikan jaminan penuh terhadap keamanan nasional. Kekuatan (*power*) adalah kunci untuk memahami hubungan internasional. Politik global dipandang sebagai pertandingan kekuatan antar negara bangsa. Kekuatan suatu negara diukur terutama berdasar kemampuan militernya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika menginvasi Irak pada tahun 2002. diplomasi internasional didasarkan pada politik kekuasaan, dimana daya paksa atau ancaman daya paksa merupakan metode utama yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingannya. Dalam hal ini relevansi negara tetap ada dan tetap

Dalam hal ini Morgenthau pun mengatakan bahwasanya salah satu ciri yang ada pada semua negara adalah kecenderungan untuk berperilaku seperti aktor rasional. Negara hanya akan mengejar tujuan yang wajar dan memang bisa dicapai sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Karena politik luar negeri suatu negara didasarkan pada kalkulasi rasional dan wajar mengenai kepentingan nasional, bukan pada pertimbangan emosional. Perlu diingat, dalam suatu sistem yang terdiri dari negara-negara atau blok-blok negara yang saling bersaing memperebutkan "*power*" ancaman perang, yang dalam sejarah kehidupan manusia tidak pernah hilang, bisa dibendung kalau masing-masing menerapkan strategi perimbangan kekuatan. Kekuatan negara, termasuk kekuatan militernya, masih tetap merupakan unsur penting dalam pengaturan sistem global.

Kenneth Waltz, pendiri aliran neo-realis, berpendapat bahwa negara terpaksa mendasarkan politik luar negerinya pada pertimbangan keamanan nasional karena pada akhirnya yang harus bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup suatu negara adalah negara itu sendiri. Karena tidak ada pemerintahan dunia, baik itu kapitalisme global maupun lembaga-lembaga internasional yang bisa mengatasi semuanya sendiri dan bertumpu pada kemampuannya sendiri. Sistem itu membuat setiap negara harus mengurus kepentingannya sendiri. Situasi berdikari seperti ini memunculkan fenomena yang disebut "*security dilemma*". Waltz mencotohkan bagaimana peran senjata konvensional dan senjata nuklir dapat mencegah terjadinya perang. Ataupun perang yang dilakukan sebagai upaya realisasi daripada politik luar negeri negara

Serikat dan beberapa negara Eropa dengan angkatan perangnya dengan mengusung isu terorisme, ataupun Korea Utara dan Iran yang mengatakan bahwa mereka memanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangunan ekonominya. Walaupun itu semua tidak pernah dapat diterima oleh Amerika Serikat dan para sekutunya. Hal ini tetap membuktikan bahwa dari dulu sampai sekarang banyak para pemimpin dan pembuat kebijakan luar negeri yang mengusung kekuatan negara, baik itu lewat persenjataan konvensional ataupun senjata nuklir. Semua itu dilakukan adalah sebagai upaya pencapaian kesejahteraan ekonomi bangsanya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Robert Gilpin, bahwa banyak fakta yang menunjukkan peran negara bangsa masih tetap relevan bahkan semakin penting di era pasar sekarang ini. Seperti halnya, regionalisme ekonomi yang ia asumsikan sebagai perwujudan dari upaya negara-negara bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional mereka. Akhirnya dapatlah diasumsikan bahwa perjalanan sejarah ekonomi dunia sampai saat ini selalu diwarnai pergulatan ideologi dan paradigma-paradigma ekonomi politik yang selalu merubah tatanan global saat ini. Walaupun banyak asumsi yang diungkapkan oleh para pendukung hiperglobalis yang menyatakan bahwa peran negara bangsa telah hancur, akan tetapi melihat fakta-fakta yang ada sampai saat ini ternyata peran negara bangsa semakin kuat. Ini semua dapat dilihat dari kerjasama-kerjasama ekonomi politik antar negara yang tidak pernah mengucilkan peranannya masing-masing. Hadirnya IMF, World Bank di setiap negara di dunia, selalu membutuhkan peran pemerintahnya, sampai kapan pun. Serbuan Amerika ke Irak pun adalah suatu

pemerintahnya. Dan bagaimana pula peran negara dalam pembangunan terjadi Korea Selatan dan Taiwan, dimana sentralitas kekuasaan sangatlah berperan penting dalam mewujudkan industrialisasi dalam negeri. Hal itu pun selalu didasarkan pada motif ekonomi dan politik.

Dari mana orang bisa berkata "di bawah globalisasi peran negara akan melemah"? Uraian di atas telah membuktikan: globalisasi bukan sesuatu yang baru, ia hanya merupakan perluasan dan penguatan imperialisme dan, dengan demikian, membutuhkan penguatan negara sebagai syarat keberhasilannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan di atas akhirnya muncul rumusan masalah sebagai berikut:

*Bagaimana pandangan kaum realis dan hiperglobalis atas peran negara bangsa dalam percaturan ekonomi dan politik di era neoliberalisme?*

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perspektif realis dan hiperglobalis terhadap peran negara bangsa dalam percaturan ekonomi politik global
- b. Penelitian ini bertujuan juga untuk membuktikan bahwa peran negara bangsa masih sangat relevan dan penting dalam percaturan ekonomi dan politik di era neo-liberalisme saat ini
- c. Sebagai sebuah bentuk uji materi terhadap apa yang selama ini penulis

#### **D. Kerangka Konseptual dan Landasan Teori**

##### **Perspektif Realisme yang Berpusat Pada Negara (*State-Centric Realism*)**

Dalam percaturan ekonomi politik internasional kita mengenal beberapa perspektif yang oleh Gilpin (2001) diidentifikasi dengan tiga hal, yaitu *liberalisme, marxisme, dan nasionalisme atau merkantilisme*. Sejak tahun 1980-an, terjadi berbagai macam perubahan secara dramatis. Perubahan ini diakibatkan oleh keruntuhan system ekonomi komunis Uni Soviet dan akhir dari strategi substitusi import (*import substitution industry*) di negara-negara kurang berkembang (*less developed countries-LDGs*). Dikarenakan perubahan ini, relevansi marxisme mulai menurun, sementara kaum neoliberal di Amerika Serikat dan Inggris membuat paham liberal semakin besar pengaruhnya dalam mengelola ekonomi nasional maupun internasional.

Runtuhnya *Tembok Berlin* yang diikuti dengan kehancuran *Uni Soviet* menandakan berakhirnya perang dingin antara blok komunis dan blok kapitalis yang telah berlangsung lebih dari setengah abad. Kini, nyaris seluruh negara di bagian penjuru bumi yang tidak tersentuh oleh serbuan kapitalisme dengan gagasan neo liberalnya. Barangkali, hanya beberapa negara yang masih bertahan dengan gagasan komunisnya yaitu, Kuba dan Korea Utara serta China. Bahkan dalam beberapa hal tertentu, China telah mengalami perubahan cukup mendasar dalam bidang ekonominya. Ditambah lagi dengan semakin terbukanya pasar China yang semakin melangkah ke arah pengelolaan ekonomi capital membuat

1. Identifikasi masalah tidak lagi relevan. Kini, paham ini lebih

merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan kritik terhadap kapitalisme.

Perspektif merkantilisme atau secara lebih khusus ekonomi nasionalisme terdiri dari elemen analitik dan normatif. Elemen analitiknya adalah dalam rangka mengenali "*the anarchic nature of international affairs*", kenggulan negara bangsa dan kepentingan-kepentingan mereka dalam hubungan internasional, dalam arti kekuatan dalam hubungan antar bangsa. Dai elemen normatif yakni berisi komitmen dan resep-resep kebijakan yang dihubungkan dengan ekonomi nasional.

Di luar ketiga perspektif yang dipaparkan di atas, Gilpin menawarkan perspektif lain yang dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara liberal dan merkantilis. Perspektif ini lah yang kita kenal dengan *state centric realism*<sup>11</sup>. Dalam perspektif ini Gilpin menerima ekonomi nasionalis atau yang sering ia sebut sebagai pendekatan yang berpusat pada negara, sebagai perspektif analitik. Namun ia menolak komitmen normatif dari kebijakan ekonomi nasional. Tetapi sebaliknya, ia mempunyai komitmen terhadap liberalisme ekonomi yang mendorong terjadinya perdagangan bebas melintasi batas-batas negara bangsa dan penghilangan hambatan-hambatan perdagangan, meskipun dalam kondisi tertentu ia mendukung kebijakan-kebijakan nasional seperti proteksi perdagangan. Dengan demikian, perspektif yang ditawarkan oleh Gilpin tetap berkomitmen pada liberalisasi perdagangan dan jasa, namun dengan tetap menyatakan bahwa peran negara bangsa tetap menjadi pelaku yang krusial dalam proses tersebut.

---

<sup>11</sup> Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding the Economic Order*,

Mengenai kuatnya peran negara bangsa dalam pembangunan ekonomi dan politik, Gilpin menunjukkan beberapa bukti. Salah satu yang ia tunjukkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah munculnya regionalisme ekonomi di kawasan Eropa atau hubungan tripartit antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dalam beberapa tahun belakangan, Uni Eropa telah menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan dalam perdagangan internasional. Disinyalir menurunnya pengaruh AS dalam ekonomi internasional dalam tahun-tahun belakangan adalah semakin kuatnya posisi ekonomi Uni Eropa. Kelompok regional ini menjadi semakin besar dalam tahun-tahun belakangan karena masuknya anggota-anggota baru dari negara eks Pakta Warsawa. Menurut Gilpin, munculnya regionalisme merupakan wujud eksistensi negara bangsa yang bersepakat untuk bersama-sama dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dan ini pun menjadi bukti bahwa peran negara bangsa semakin diperlukan di era globalisasi saat ini.

### **Perspektif Transformasionalis**

**Robert O. Keohane (2000)** dalam hal ini berdiri di garis transformasionalis dalam memandang kedaulatan negara di tengah arus globalisasi saat ini. Hadirnya semacam institusi Masyarakat Eropa (EC) merupakan jawaban atas tumbuhnya institusi untuk mengatasi hubungan interdependen. Kehadiran institusi tersebut telah mengubah makna kedaulatan. Kini, keputusan internasional tidak lahir dari negara tersebut saja, tetapi ada tumbuh dalam basis global.

... ..

mengatasi tumbuhnya masyarakat internasional yang potensial menimbulkan anarki karena hanya akan melahirkan entitas predator. Problem dunia saat ini adalah bagaimana kita bisa melakukan aransemen institusi yang konsisten mengatasi problem global dengan problem domestik. Institusi ini tidak mungkin dibentuk oleh melalui pemerintah atau negara, tetapi melalui keterlibatan masyarakat sipil internasional (*international civil society*), tidak juga dikonstruksi oleh kekuatan hegemonik yang tunggal, tetapi oleh setiap negara yang memiliki kepentingan.

Sistem internasional menurut Keohane, harus mampu menjadi institusi yang bisa melakukan intermediasi dan pemeliharaan institusi yang ada, melakukan moderasi atas konflik, menciptakan keputusan yang koheren untuk menciptakan kemakmuran yang kolektif dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Robert Keohane mencoba melakukan elaborasi tentang hadirnya masyarakat internasional sebagai ruang sosio-politik yang nyata dalam zaman globalisasi. Pemikiran keohane sangat dipengaruhi oleh tradisi realis dalam memandang hubungan internasional baru.<sup>12</sup>

Keohane berdiri dalam perspektif neo-realis dan mencoba melihat makna kedaulatan yang tidak semata-mata dinisbahkan kepada negara. Negara tidak lagi dipandang sebagai aktor monolitik dalam menjadi pemain kunci satu-satunya dalam hubungan internasional. Kehadiran masyarakat internasional merupakan sesuatu yang niscaya (*historical imperative*), akan tetapi posisi negara tidak

---

<sup>12</sup> lihat Review Robert O. Keohane, "Sovereignty In International Society", dalam David Held dan Anthony McGrew (eds), *Global Transformations Reader*, 2000, dalam Review Oleh Ade Ma'ruf W., SIP., *Kedaulatan Di Tengah Tumbuhnya Masyarakat Global*

## **Neo-Liberalisme**

Runtuhnya *Tembok Berlin* yang di ikuti dengan kehancuran *Uni Soviet* menandakan berakhirnya perang dingin antara blok komunis dan blok kapitalis yang telah berlangsung lebih dari setengah abad. Kini, nyaris seluruh negara di bagian penjuru bumi yang tidak tersentuh oleh serbuan kapitalisme dengan gagasan neo liberalnya. Barangkali, hanya beberapa negara yang masih bertahan dengan gagasan komunisnya yaitu, Kuba dan Korea Utara serta China. Bahkan dalam beberapa hal tertentu, China telah mengalami perubahan cukup mendasar dalam bidang ekonominya. Pendek kata, kapitalisme telah menang setelah melewati pertarungan melelahkan. Pada titik inilah umumnya semua teoritis sosial berbicara bahwa globalisasi ekonomi adalah sebuah hal yang amat susah untuk di tolak. Neo liberalisme bagaikan sebuah mantra sakti yang telah menyihir hampir semua negara untuk tunduk pada gagasan integrasi ekonomi global.

Francis Fukuyama salah seorang ilmuwan sosial menyebutnya sebagai akhir sejarah. Demokrasi Liberal dan kapitalisme adalah sebuah bentuk ideal dari tatanan masyarakat sekarang. Lebih lanjut lagi manusia telah lelah dengan pesimisme dan otoritarianisme yang terjadi selama ini. Integrasi ekonomi global adalah sebuah proyeksi dan terus di dorong oleh negara-negara yang merupakan penyokong utama dari kapitalisme. Walaupun dalam beberapa hal tertentu, gagasan ini memiliki akibat yang sangat kompleks.

Kenichi Ohmae (1995), salah seorang teoritis neo-liberal menjelaskan, bahwa sebuah negara bangsa sudah kehilangan maknanya dan akan digantikan dengan komunitas negara-negara kawasan. Dalam bahasa Ohmae hal ini terjadi

diakibatkan oleh gempuran empat "I". *Investasi, Industrialisasi, informasi dan komunikasi (teknologi) dan Individu*. Empat "I" inilah yang menyebabkan sebuah negara untuk berpikir ulang kembali tentang konsep kedaulatan politik ekonomi dan budayanya<sup>14</sup>.

1. *Investasi, sebagai "I" pertama* tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial sebuah negara. Dunia masa kini ditandai dengan kemudahan sebuah perusahaan atau seseorang untuk berinvestasi, dimanapun seseorang berada maka dengan mudah bisa menginvestasikan kekayaannya tanpa perlu berhadapan dengan aturan prosedural yang melelahkan. Puluhan tahun yang lalu, aliran dana lintas batas selalu antar negara dari pemerintah ke pemerintah atau dari agen peminjam multilateral ke pemerintah. Tetapi, untuk masa sekarang tidak belaku lagi, setiap orang bebas berinvestasi tergantung dari kesempatan yang ada.
2. *Multinational Corporation (MNC)*, sebagai penggerak industrialisasi, akan memasuki setiap negara yang sanggup menyediakan tempat mereka untuk hidup dan memperoleh keuntungan, tanpa harus membuat begitu banyak kesepakatan dengan pemerintah. Hal ini berbeda dengan keadaan terdahulu, dimana sebuah perusahaan harus membuat begitu banyak kesepakatan dengan pemerintah negaranya atau negara tempat tujuan berinvestasi. Dahulunya sebuah negara memiliki otoritas yang sangat kuat bahkan bisa menghalangi sebuah perusahaan asing untuk masuk. Misalnya, melalui sistem proteksi

---

<sup>14</sup> Lihat Kenichi Ohmae, *HANCURNYA NEGARA BANGSA, Bangkitnya Negara*

dengan wujud, pajak masuk tinggi dan subsidi untuk produk dalam negeri. Tetapi, kini hal seperti itu mulai di tinjau ulang. Nah, pada titik inilah "I" kedua yaitu *industrialisasi* memainkan perannya.

3. *Teknologi Informasi dan komunikasi sebagai "I" ketiga*, memainkan peran yang sangat penting dalam membangun sebuah jaringan ekonomi yang terintegrasi sepenuhnya dalam dunia internasional. Dengan bantuan teknologi informasi perusahaan-perusahaan besar dari Jepang, Amerika dengan mudah dapat mengontrol kegiatan ekonominya di negara lain tanpa harus bersusah payah pergi ke negara tersebut.
4. Akhirnya *Individu sebagai "I" ke empat* telah memiliki orientasi lebih global. Dengan akses informasi yang baik pelbagai gaya hidup di seluruh belahan dunia dengan cepat diketahui, sehingga keinginan mereka membeli sebuah produk tidak lagi di kondisikan oleh larangan pemerintah untuk membeli produk Amerika, Jepang, Prancis sebagai wujud dari asosiasi nasional mereka. Para konsumen ingin produk terbaik termurah tidak masalah dari mana asal produk tersebut.

## **E. Definisi Konseptual**

Konsep atau penjelasan adalah sebuah hal yang sangat vital dalam sebuah penelitian. Dan sebuah konsep sebenarnya adalah merupakan definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau fenomena-fenomena tersebut

1. Neo-Liberalisme secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk gagasan yang berusaha meminimalisir peran negara sampai tingkat yang terendah bahkan bisa dihilangkan sama sekali dalam kegiatan ekonomi. Juga diupayakan untuk dilakukannya kompetisi bebas bagi para pelaku ekonomi.
2. Negara-Bangsa didefinisikan sebagai tahap-tahap pembauran atau perpaduan yang mungkin terjadi antara batas-batas kultur dan politik dalam kesinambungan kontrol politik yang dilakukan oleh suatu otoritas sentral dalam suatu wilayah tertentu beserta penghuninya.
3. Realis didefinisikan sebagai perspektif ekonomi politik internasional yang sangat mengedepankan determinasi negara dalam mengatur ekonomi pasar nasional.
4. Hiperglobalis didefinisikan sebagai perspektif ekonomi politik yang sangat mendukung mekanisme pasar secara total dan menolak intervensi negara.

## **F. Hipotesa**

Dari penelaahan pandangan antara kaum realis dan hiperglobalis di atas, dapat ditarik suatu hipotesa: *pertama*, bagi perspektif realis, proses globalisasi tetap membutuhkan peran negara bangsa dalam menancapkan ideologi neo-liberalismenya. *Kedua*, bagi perspektif hiperglobalis, di era globalisasi, eksistensi

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif

- a. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.
- b. Penelitian eksploratif yaitu metode penelitian yang berusaha mencari atau mengungkapkan hal-hal baru yang belum diungkap sebelumnya.
- c. Penelitian deskriptif eksploratif adalah sebuah penelitian yang mendapatkan data awal atau hal baru yang masih samar-samar yang dilakukan seteliti mungkin untuk mendapatkan suatu pembacaan yang komprehensif.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka. adapun data tersebut memiliki sumber sebagai berikut: buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *digital ensiclopedia* seperti internet, CD, serta media-media lain yang dapat membantu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang objek yang dikaji.

## **H. Sistematika penulisan**

Tulisan ini akan disusun berdasarkan bab per bab. Setiap bab terdiri dari sub-

bab-bab yang mempermudah membahas satu persatu masalah yang diteliti

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif

- a. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.
- b. Penelitian eksploratif yaitu metode penelitian yang berusaha mencari atau mengungkapkan hal-hal baru yang belum diungkap sebelumnya.
- c. Penelitian deskriptif eksploratif adalah sebuah penelitian yang mendapatkan data awal atau hal baru yang masih samar-samar yang dilakukan setelah mungkin untuk mendapatkan suatu pembacaan yang komprehensif.

### **2. Teknik pengumpulan data**

Dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka. adapun data tersebut memiliki sumber sebagai berikut: buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *digital ensiclopedia* seperti internet, CD, serta media-media lain yang dapat membantu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang objek yang dikaji.

## **H. Sistematika penulisan**

Tulisan ini akan disusun berdasarkan bab per bab. Setiap bab terdiri dari sub-

Sedangkan sub-bab akan dipergunakan untuk membahas masalah secara mendetail. Sehingga muncul sebuah pemahaman yang lebih komprehensif.

## **H. Kerangka Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal pokok yang menjadi acuan bagi keseluruhan isi skripsi. Untuk mempermudah penguraian maka bab ini akan dibagi kedalam beberapa kerangka sebagai berikut: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Landasan Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan dan Rencana Kepustakaan.

### **BAB II : NEGARA BANGSA DALAM PERTUMBUHAN KAPITALISME**

Dalam bab II ini akan dibahas mengenai pengertian dan sejarah lahirnya negara bangsa (*nation-state*) di dunia, dan akan dilanjutkan dengan tinjauan historis perkembangan kapitalisme sejak awal kelahiran hingga menjadi rezim internasional saat ini. Kemudian juga , akan ditambahkan tentang perbedaan antara fase liberal dan neoliberal. Supaya lebih untuk mendapatkan pemahaman akan pembahasan yang ada.

### **BAB III : PERKEMBANGAN REALIS DAN HIPERGLOBALIS DALAM PERCATURAN EKONOMI DAN POLITIK INTERNASIONAL**

Selanjutnya dalam bab III ini akan diuraikan tentang sejarah lahirnya dua

yaitu realis dan hiperglobalis dan bagaimana keduanya mempengaruhi perkembangan politik internasional sampai saat ini.

#### **BAB IV : PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ANTARA PERSPEKTIF REALIS DAN HIPERGLOBALIS DALAM MEMANDANG PERAN NEGARA BANGSA DI ERA NEO LIBERALISME**

Dalam bab IV ini akan banyak dibahas dan digambarkan tentang perbedaan dan persamaan antara perspektif realis dan hiperglobalis, kemudian akan dibahas secara dikotomis dua perspektif utama ini dalam menganalisis globalisasi yaitu dalam memandang peran negara bangsa di era neo liberalisme saat ini.

#### **BAB V : KESIMPULAN**

Dalam bab V ini akan berisi kesimpulan dari perjalanan intelektual ilmiah dari studi yang dilakukan dari Bab I hingga Bab IV.